



LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHKSEUMAWE



SIAP MELAYANI DI MASA PANDEMI

Pandemi tidak menghalangi KPKNL Lhokseumawe untuk terus bekerja keras meningkatkan mutu pelayanan serta menjaga integritas dalam melayani segenap masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, KPKNL Lhokseumawe sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja dibuat untuk mengukur kinerja KPKNL Lhokseumawe selama tahun anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe mencapai 110,63% pada tahun 2021. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tersebut terdiri dari *Stakeholder Perspective* 25%, *Customer Perspective* 15%, *Internal Process Perspective* 30%, dan *Learning & Growth Perspective* 30%. Capaian tersebut merupakan kontribusi dan kerja keras seluruh pegawai dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Lhokseumawe.

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam upaya pencapaian visi dan misi KPKNL Lhokseumawe. Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, kami berharap laporan ini dapat berguna sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja yang telah dicapai sekaligus indikator guna meningkatkan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Lhokseumawe, 22 Januari 2022

Kepala Kantor,



Bono Yudianto

NIP 19730310 199903 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe ini disusun sebagai bagian dari perwujudan praktek *good governance*. Perwujudan tersebut merupakan asas akuntabilitas di KPKNL Lhokseumawe bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai laporan pencapaian pelaksanaan program/Rencana Kerja Tahun 2021, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Aceh dandiharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada tahun anggaran 2021, dari 10 sasaran strategis dengan 19 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2021, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan hasil sebesar 110,63% untuk Capaian Nilai Kinerja Organisasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Lhokseumawe yang pada tahun 2021 mendapatkan alokasi dana DIPA sebesar Rp 1.810.318.000 dan dapat kami realisasikan di luar belanja pegawai sebesar Rp 1.793.522.399 atau 99,07%.

Berdasarkan pada *Strategy Map Kemenkeu-Three* KPKNL Lhokseumawe tahun 2020, terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dengan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan KPKNL Lhokseumawe yang penjabarannya dari masing-masing perspektif dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 25% tercapai sebesar 33,55%;
2. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 33,43%;
3. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 30% tercapai 34,25%;

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	13
B. Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh. Tugas KPKNL Lhokseumawe sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe dipimpin oleh seorang Kepala, dengan susunan organisasi :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Pelayanan Penilaian;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Pelayanan Lelang;
- f. Seksi Hukum dan Informasi;
- g. Seksi Kepatuhan Internal;
- h. Jabatan Fungsional Pelelang.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe meliputi wilayah Kabupaten/Kota :

- a. Kab. Aceh Utara;
- b. Kab. Aceh Tengah;
- c. Kab. Aceh Timur;
- d. Kab. Aceh Tenggara
- e. Kab. Aceh Tamiang;
- f. Kab. Bireun;
- g. Kab. Bener Meriah;
- h. Kab. Gayo Lues;

- i. Kota Lhokseumawe;
- j. Kota Langsa.



Gambar 1.1 Wilayah Kerja KPKNL Lhokseumawe

Sasaran-sasaran strategis organisasi yang dimiliki oleh KPKNL Lhokseumawe meliputi:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- 2) Pelayanan publik yang prima;
- 3) Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara;
- 4) Manajemen pelayanan yang berkualitas;
- 5) Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel;

- 6) Tata kelola piutang negara dan lelang yang akuntabel;
- 7) Edukasi yang efektif;
- 8) Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif;
- 9) Sumber Daya Manusia yang kompeten
- 10) Organisasi yang fit for purpose;
- 11) Sistem manajemen informasi yang andal;
- 12) Pengelolaan anggaran yang berkualitas.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2021 didukung oleh 23 orang pegawai dengan posisi sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor : 1 orang
- b. Kepala Sub Bagian Umum : 1 orang dan 6 orang staf
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara : 1 orang dan 2 orang staf
- d. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian : 1 orang staf
- e. Kepala Seksi Piutang Negara : 1 orang dan 1 orang staf
- f. Kepala Seksi Pelayanan Lelang : 1 orang staf
- g. Kepala Seksi Hukum dan Informasi : 1 orang dan 2 orang staf
- h. Kepala Seksi Kepatuhan Internal : 1 orang dan 1 orang staf
- i. Fungsional Pelelang : 2 orang
- j. Fungsional Penilai : 2 orang

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pelaksana	-	9	5	-	14
2.	Fungsional Pelelang	-	-	2	-	2
3	Fungsional Penilai Pemerintah	-	-	2	-	2
4.	Eselon IV	-	-	4	-	4
5.	Eselon III	-	-	-	1	1
	Jumlah		9	13	1	23

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe
Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SMA/MAN/SMEA/KPAA	-	-	1	-	1
2	Diploma I	-	1	-	-	1
3	Diploma III	-	8	-	-	8
4	Diploma IV / Strata 1	-	-	12	-	12
5	Strata 2	-	-	-	1	1
	Jumlah	0	9	13	1	23

Tabel 1.3

Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe
Berdasarkan Gender

No.	Gender	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Laki-laki	-	6	11	1	18
2.	Perempuan	-	3	2	-	5
	Jumlah	-	9	13	1	23

Tabel 1.4

Komposisi Pegawai KPKNL Lhokseumawe
Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No.	Kelompok Umur	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	18 – 30 tahun	-	9	3	-	12
2.	31 – 40 tahun	-	-	5	-	5
3.	41 – 50 tahun	-	-	5	1	6
4.	Di atas 50 tahun	-	-	-	-	0
	Jumlah	-	9	13	1	23

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Lhokseumawe merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis KPKNL Lhokseumawe disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Sesuai konsep rencana strategis DJKN tahun 2020-2024, visi DJKN yaitu : **“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai pedoman dan landasan kerja. Oleh karena itu, untuk merealisasikan visi yang ditetapkan maka KPKNL Lhokseumawe memiliki misi yang terdiri dari:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah kekayaan Negara;
- d. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- e. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam menjalankan seluruh visi dan misi diatas, senantiasa harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi akuntabilitas, *rule of law* dan transparansi, serta didukung oleh sistem dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Lhokseumawe untuk periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberikan manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

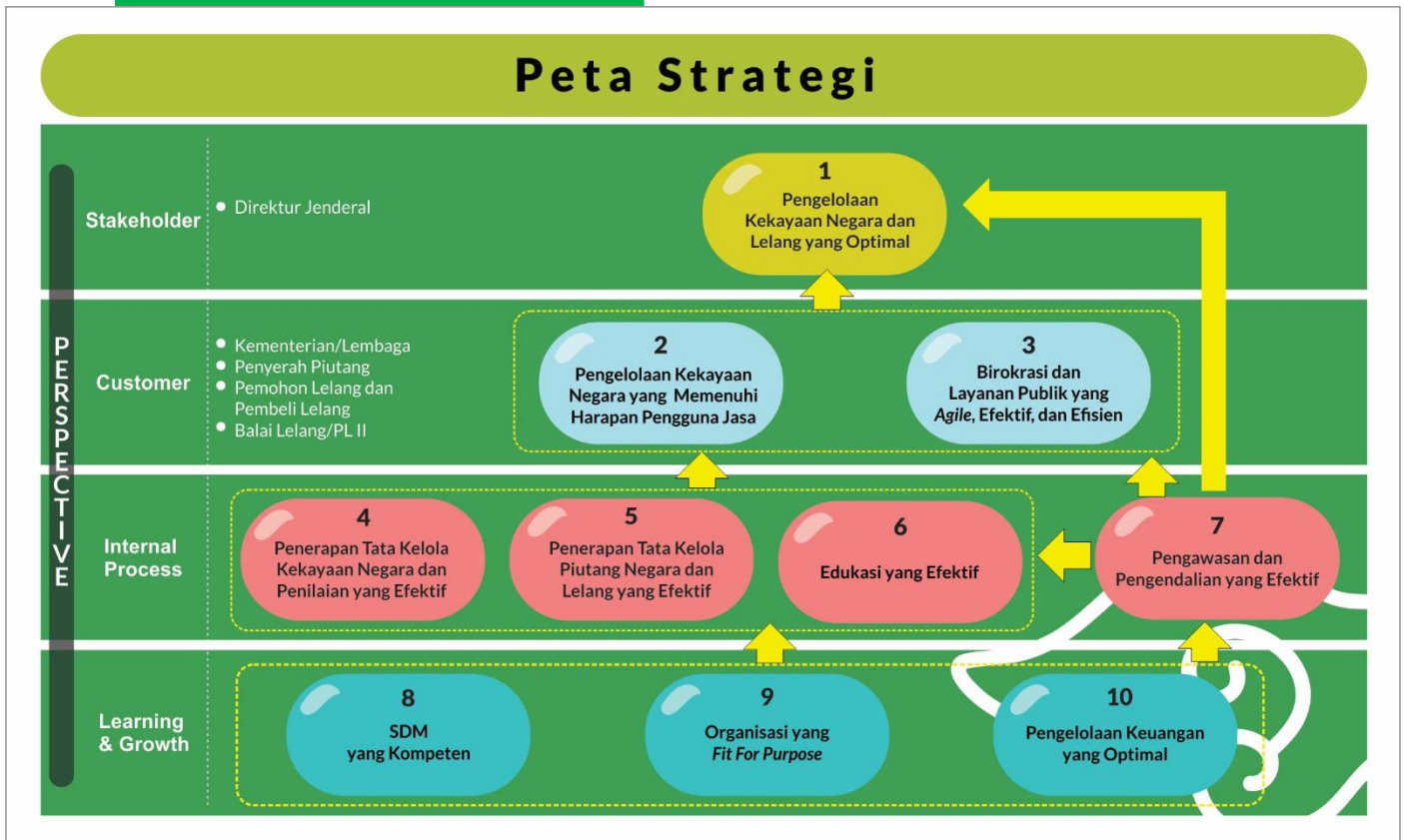
B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Peta Strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-besar
Kemakmuran Rakyat



Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Lhokseumawe

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Lhokseumawe harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Lhokseumawe. Sasaran Strategis KPKNL Lhokseumawe Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2021 yang terlihat pada Gambar 2.1. Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2020 memuat 10 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Lhokseumawe Tahun 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88	88	88	88	88	88	88 (skala 100)
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien							
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,5	4,5 (skala 5)
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
	4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%

No	SS, IKU		Target					
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4
	5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91	91	-	91	91 (skala 100)
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%
8	SDM yang Kompeten							
	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
	9a-N	Nilai revidi Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75 (skala 100)
	9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA ACEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	72,22%	116,49%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%	94,14%	94,14%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%	164%	120,00%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88 (skala 100)	95,82	108,89%
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	174,43%	120,00%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,5 (skala 5)	4,70	104,44%
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%	101,20%	101,20%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	100,00%	100,00%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	0,00%	120,00%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%	148,81%	120,00%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%	46,48%	120,00%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Lelang yang Efektif	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100,00%	108,70%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	0,00%	120,00%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91 (skala 100)	92,76	101,93%
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	91,23%	107,33%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75 (skala 100)	97,61	120,00%
		9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80 (skala 100)	97,63	120,00%
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	94,93%	99,40%

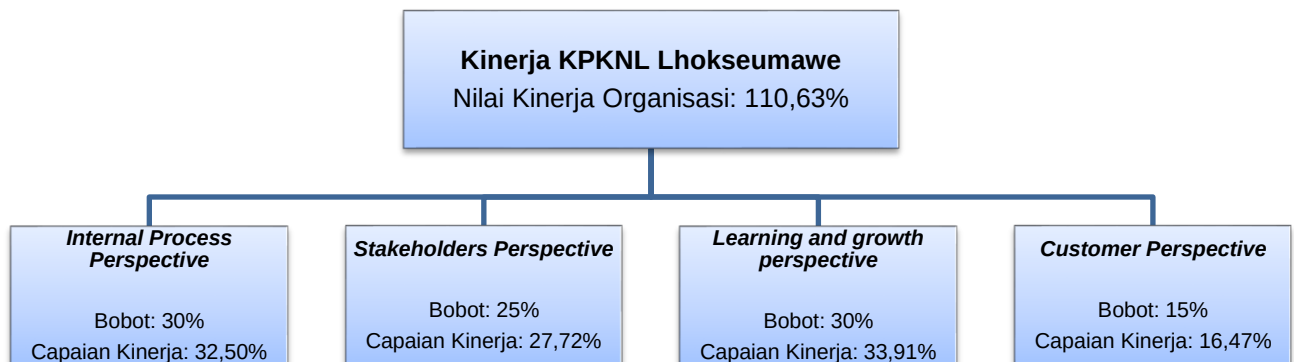
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Lhokseumawe adalah sebesar 110,63%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1

Capaian Kinerja Masing-Masing Perspektif



Selama tahun 2021, dari 19 IKU KPKNL Lhokseumawe, secara keseluruhan 17 IKU berstatus hijau atau tercapai, 2 IKU berstatus kuning. Perbandingan jumlah IKU berdasarkan indeks capaian tertuang dalam Grafik 3.2 berikut.

Atas tugas dan fungsi KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2021 yang telah dilaksanakan secara optimal dengan memperoleh hasil yang memuaskan dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							27,72%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							110,88%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	72,22 %	19%	40%	116,488 %	116,49%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	94,14 %	14%	30%	94,14%	94,14%	kuning
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	164%	14%	30%	163,79 %	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,47%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							115,11%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	88,00	95,82	11%	44%	108,89 %	108,89%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	174,43 %	14%	56%	174,43 %	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							104,44%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,5	4,70	21%	100 %	104,44 %	104,44%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							32,50%	

4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							106,88%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	101,20 %	19%	43%	101,20 %	101,20%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	100,00 %	11%	25%	100,00 %	100,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,00%	14%	32%	200,00 %	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							117,17%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	148,81 %	14%	25%	148,81 %	120,00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00 %	46,48 %	14%	25%	132,80 %	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92,00 %	100,00 %	14%	25%	108,70 %	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	12,50 %	0,00%	14%	25%	200,00 %	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							101,93%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	91	92,76	14%	100 %	101,93 %	101,93%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							107,33%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	91,23 %	14%	100 %	107,33 %	107,33%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							33,91%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00 %	14%	100 %	120,00 %	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	

9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75%	97,61	14%	50%	13014,67%	120,00%	hijau
9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	97,63	14%	50%	122,03%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							99,40%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	94,93%	14%	100%	99,40%	99,40%	kuning
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								110,63%	hijau

Dari capaian kinerja terhadap 19 IKU Kemenkeu *Three* tahun 2021 tersebut, KPKNL Lhokseumawe melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* tahun 2021. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun, target addendum dan realisasi kinerja tahun 2021. Analisis tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. SASARAN STRATEGIS: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG OPTIMAL

"Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle); 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating); 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum); 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat".

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut.

a. Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

1) Deskripsi Kinerja

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

Tabel 3.2

Capaian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	Min/ TLK
Realisasi	11,49%	47,85%	47,85%	72,88%	72,88%	72,22%	72,22%	
Capaian	N/A	95,70%	95,70%	120%	120%	116,49%	116,49%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

Banyak ditemukan bangunan pada satker yang dibangun sebelum adanya ketentuan tentang SBSK.

Implikasi:

Realisasi capaian kinerja tidak bisa 120%.

b) Akar Masalah

1) Ruang kerja yang bersifat privacy menjadi kendala dalam teknis pelaksanaan pengukuran SBSK.

Bangunan pada satker yang dibangun sebelum adanya ketentuan SBSK cenderung lebih sulit untuk tercapainya target pengukuran SBSK.

2) Adanya BMN yang tidak dipergunakan karena alasan tertentu.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1) Meningkatkan koordinasi dengan satker, diantaranya dengan melalui media yang dianjurkan seperti telepon, aplikasi WhatsApp, Telegram dan Zoom serta e-mail.

2) Meningkatkan koordinasi dengan Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN terkait optimalisasi penghitungan kesesuaian SBSK.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

1) Meningkatkan koordinasi dengan satker untuk lebih mengoptimalkan penggunaan BMN.

- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN terkait optimalisasi penghitungan kesesuaian SBSK.

b. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseuma we	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	13,62%	35,48%	35,48%	65,52%	65,52%	90,39%	90,39%	
Capaian	120%	118,26%	118,26%	109,20%	109,20%	90,39%	90,39%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

PNBP Pengelolaan Aset sebagian besar bergantung kepada hasil lelang barang rampasan satker Kejaksaan Negeri. Relaksasi nilai sewa BMN sesuai PMK 115/2020 secara tidak disadari justru menyebabkan turunnya realisasi PNBPN Pengelolaan Aset. Implikasi: Berpotensi tidak tercapainya target PNBPN Pengelolaan Aset. **(Seksi PKN)** Isu utama: terlaksana dengan baik; Implikasi: PNBPN PN yang dihasilkan sebesar Rp21.356.202,00 dari target Rp19.325.900,00 **(Seksi PN)** Isu utama: Belum terlaksana dengan baik. Implikasi: Objek lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang markatable (banyak lelang TAP) **(Seksi Lelang)**.

b) Akar Masalah

1. Penetapan target PNBPN Pengelolaan Aset tidak berdasarkan potensi riil dari portofolio BMN yg ada pada satker di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, tetapi berdasarkan realisasi periode sebelumnya yg berasal dari hasil lelang barang rampasan Kejaksaan Negeri. IKU PNBPN Pengelolaan Aset hanya menghitung nominal PNBPN yang dihasilkan, tidak memperhitungkan multiplier effect secara ekonomi dan sosial atas relaksasi nilai sewa BMN kepada mitra sewa yang memenuhi kriteria. **(Seksi PKN)**

2. Tidak ada **(Seksi PN)**.
3. Objek lelang berupa Barang Tidak Bergerak kurang marketable **(Seksi Lelang)**.
- c) Tindakan yang Dilaksanakan
 1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja guna penggalan potensi pemanfaatan aset **(Seksi PKN)**.
 2. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil DJKN Aceh dan Dit. BMN **(Seksi PKN)**.
 3. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial untuk diikutsertakan dalam *Crash Program* (keringanan utang) **(Seksi PN)**.
 4. Melakukan sosialisasi kepada penyerah piutang melalui media *video conference* terkait PMK 15/PMK.06/2021 (Crash Program) **(Seksi PN)**.
 5. Melaksanakan sesuai ketentuan berlaku **(Seksi Lelang)**.
- d) Rekomendasi Rencana Aksi
 1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja guna penggalan potensi pemanfaatan aset **(Seksi PKN)**.
 2. Meningkatkan koordinasi Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN **(Seksi PKN)**.
 3. Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial **(Seksi PN)**.
 4. Melanjutkan pengurusan piutang negara ke tahap berikutnya **(Seksi PN)**.
 5. Pelaksanaan kegiatan *on the spot* dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang akan dikunjungi dan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan **(Seksi PN)**.
 6. Menghimbau para Pemohon lelang agar lebih meningkatkan permohonan lelang terutama yang mempunyai potensi laku **(Seksi Lelang)**.

c. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

1) Deskripsi Kinerja

IKU Tingkat *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga **31 Desember 2017**. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut:

1. Angsuran
2. Pelunasan
3. Penarikan/ Pengembalian
4. Pelunasan
5. PSBDT
6. Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2021.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Tingkat Outstanding PN (Saldo PNDS s.d. Tahun 2017)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	2,86%	92%	92%	111%	111%	164%	164%	
Capaian	11,44%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

Terlaksana dengan baik.

Implikasi:

Penurunan Outstanding sebesar Rp1.355.835.211,42 dari target Rp827.771.068,00.

b) Akar Masalah

Tidak ada.

c) Tindakan yang Dilaksanakan

- 1) Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial untuk diikutsertakan dalam *Crash Program* (keringanan utang).
- 3) Melakukan sosialisasi kepada penyerah piutang melalui media *video conference* terkait PMK 15/PMK.06/2021 (Crash Program).

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Melakukan koordinasi dengan penyerah piutang terkait penagihan dan pemeriksaan debitur potensial
- 2) Melanjutkan pengurusan piutang negara ke tahap berikutnya.
- 3) Pelaksanaan kegiatan *on the spot* dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang akan dikunjungi dan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan.

2. SASARAN STRATEGIS: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagaimana berikut:

a. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara

1) Deskripsi Kinerja

Layanan Kekayaan Negara yang Diukur:

1. Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL

a) Jumlah Objek 1-50	100= <10 hari kerja	Sangat tepat waktu
	90= 10-15 hari kerja	
	80= 16-24 hari kerja	
	70=25 hari kerja	Tepat waktu
	60= 26-32 hari kerja	Tidak tepat waktu
	50 = 33-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu
	40 = > 40 hari kerja	
b) Jumlah Objek 51-100	100= <10 hari kerja	Sangat tepat waktu
	90= 10-15 hari kerja	
	80= 16-26 hari kerja	
	70=27 hari kerja	Tepat waktu
	60= 28-35 hari kerja	Tidak tepat waktu
	50 = 36-40 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu
	40 = > 40 hari kerja	
c) Jumlah Objek >100	100= <10 hari kerja	Sangat tepat waktu
	90= 10-19 hari kerja	
	80= 20-28 hari kerja	
	70=29 hari kerja	Tepat waktu
	60= 30-40 hari kerja	Tidak tepat waktu
	50 = 41-50 hari kerja	Sangat tidak tepat waktu
	40 = > 50 hari kerja	

2. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL

100 = 1 s.d. 2 hari kerja 90 = 3 hari kerja 80 = 4 hari kerja	Sangat tepat waktu
70 = 5 hari kerja	Tepat waktu
0 = > 5 hari kerja	Tidak tepat waktu

3. Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL

100 = 1 s.d. 2 hari kerja 90 = 3 s.d. 4 hari kerja 80 = 5 s.d. 6 hari kerja	Sangat tepat waktu
70 = 7 hari kerja	Tepat waktu
0 = > 7 hari kerja	Tidak tepat waktu

4. Penetapan Jadwal Lelang

100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
70 = 2 hari kerja (SOP LU)	Tepat waktu
0 = > 2 hari kerja	Tidak tepat waktu

5. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang

100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu

6. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang

100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu

7. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang

100 = 1 hari kerja
0 = > 1 hari kerja

8. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)

100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu

9. Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)

100 = 1 hari kerja 80 = 2 hari kerja	Sangat tepat waktu
70 = 3 hari kerja	Tepat waktu
0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu

10. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL

100 = 1 s.d. 4 hari kerja 90 = 5 s.d. 9 hari kerja 80 = 10 s.d. 14 hari kerja	Sangat tepat waktu
70 = 15 hari kerja	Tepat waktu
0 = > 15 hari kerja	Tidak tepat waktu

11. Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara

100 = 1 hari kerja 80 = 2 hari kerja	Sangat tepat waktu
70 = 3 hari kerja	Tepat waktu
0 = > 3 hari kerja	Tidak tepat waktu

12. Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan

100 = 1 hari kerja 90 = 2 hari kerja 80 = 3 hari kerja	Sangat tepat waktu
70 = 4 hari kerja.	Tepat waktu
0 = > 4 hari kerja	Tidak tepat waktu

13. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas

100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu

14. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai

100 = 1 hari kerja	Sangat tepat waktu
0 = > 1 hari kerja	Tidak tepat waktu

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yg memenuhi harapan pengguna jasa							
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	88	88	88	88	88	88	88	Max/ Average
Realisasi	97,02	93,51	93,51	95,29	95,29	97,63	95,88	
Capaian	110,25%	106,26%	106,26%	108,29%	108,29%	108,95%	108,95%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama Dan Implikasi

- 1) Selalu ada potensi tidak terpenuhinya SOP penyelesaian waktu layanan kekayaan Negara.

Implikasi : Menurunnya tingkat kepuasan layanan dari satuan kerja **(Seksi PKN)**.

- 2) 11 permohonan keringanan utang disetujui diantara 1-4 hari kerja (Telah dilaksanakan dengan baik) **(Seksi PN)**.

- 3) Tidak ada isu karena sudah tercapai **(Seksi Lelang)**.

- 4) Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang, Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang, Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara), Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara), Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas, Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai telah diselesaikan tepat waktu. **(Seksi HI)**.

b) Akar Masalah

- 1) Kegiatan IKU lain yang harus segera direalisasikan, Keterbatasan SDM, Permohonan PSP, Pemindahtanganan, Pemanfaatan yang masuk secara bersamaan dalam jumlah banyak. **(Seksi PKN)**.
- 2) Terdapat 1 bea lelang batal yang belum disetorkan dikarenakan belum jelas pemohon dan debitornya. **(Seksi HI)**.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- 1) Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku **(Seksi PN)**.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan satker guna terpenuhinya kelengkapan berkas permohonan **(Seksi PKN)**.
- 3) Meningkatkan sinergi di internal seksi PKN dan antar seksi **(Seksi PKN)**.
- 4) Pelayanan Kebendaharaan Tepat Waktu, Koordinasi dengan Bank **(Seksi HI)**.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Koordinasi dan saling sinergi dengan seksi piutang Negara, seksi lelang, dan para pejabat fungsional pelelang, serta bank **(Seksi HI)**.

- 2) Meningkatkan internal control atas berkas permohonan yang masuk (**Seksi PKN**).
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan satker terkait kelengkapan berkas permohonan sebelum dikirimkan ke KPKNL (**Seksi PKN**).
- 4) Meningkatkan sinergi di internal seksi PKN dan antar seksi (**Seksi PKN**).
- 5) Melakukan pengawasan secara berkala terhadap permohonan layanan (**Seksi PN**).

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yg memenuhi harapan pengguna jasa							
	Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	11,62%	14,83%	14,83%	140,54%	140,54%	174,43%	174,43%	
Capaian	58,12%	37,07%	37,07%	120%	120%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Isu Utama:

- 1) Banyaknya lelang TAP dan Batal sehingga menyebabkan target pokok lelang sulit tercapai.
- 2) Pandemi Covid-19 menurunkan daya beli masyarakat.
- 3) Sudah terlaksana dengan baik.

Implikasi: target pokok lelang sudah mencapai 174,43% atau sebesar Rp73.261.306.380,00.

b) Akar Masalah

Objek lelang berupa barang tidak bergerak kurang marketable (banyak lelang TAP).

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Menghimbau para Pemohon lelang agar lebih meningkatkan permohonan lelang terutama yang mempunyai potensi laku.

3. SASARAN STRATEGIS: BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG AGILE, EFEKTIF, DAN EFISIEN

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 1 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

1) Deskripsi Kinerja

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Birokrasi dari Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,50	Max/TLK
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,70	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	104,44%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

- Isu utama dan implikasi
Tidak ada.
- Akar Masalah
Tidak ada.
- Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Rekomendasi Rencana Aksi
Melakukan pengawasan secara berkala oleh kepala seksi terhadap pelayanan.

4. SASARAN STRATEGIS: PENERAPAN TATA KELOLA KEKAYAAN NEGARA DAN PENILAIAN YANG EFEKTIF

“Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna”.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut:

a. Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikasi

1) Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang

Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN:

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan.

Kendali K/L:

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertifikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat;
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik;
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertipikatkan;
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan;
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertipikatkan;
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2021 adalah sampai dengan tahapan ke-6, yaitu pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan penilaian yang Efektif							
	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	N/A	20%	20%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	N/A	61,66%	61,66%	101,20%	101,20%	101,20%	101,20%	
Capaian	N/A	120%	120%	120%	120%	101,20%	101,20%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Telah dilaksanakan dengan baik.

b) Akar Masalah

Target telah tercapai.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, Kantor Pertanahan, Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN.

2) Melaksanakan hal-hal antisipatif untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target sertifikasi BMN berupa tanah.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Target telah tercapai.

b. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

1) Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan penilaian yang Efektif							
	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	35,56%	68,89%	68,89%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	100%	100%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Isu utama:

Pandemi covid19

Implikasi:

Minor

b) Akar Masalah

Pandemi covid19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dalam pelaksanaan survey lapangan portofolio aset.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1) Meningkatkan koordinasi dengan satker baik secara langsung atau melalui media yang dianjurkan seperti telepon, aplikasi WhatsApp, Telegram, Zoom dan e-mail.

2) Meningkatkan koordinasi dengan Bidang PKN Kanwil DJKN Aceh dan Direktorat BMN DJKN.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Tidak ada.

c. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu.

Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan penilaian yang Efektif							
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Tidak ada.

b) Akar Masalah

Tidak ada.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Melaksanakan penilaian sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku serta menghasilkan nilai wajar yang akuntabel.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Melakukan pengawasan secara berkala oleh kepala seksi terhadap pelayanan.

5. SASARAN STRATEGIS: PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF

“Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna”.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 4 IKU. Uraian mengenai keempat IKU adalah sebagaimana berikut:

a. Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN

1) Deskripsi Kinerja

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas;
2. BKPN Penarikan;
3. BKPN dikembalikan, dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	2,38%	26,19%	26,19%	97,62%	97,62%	148,81%	148,81%	
Capaian	9,52%	52,38%	52,38%	120%	120%	120%	120%	

Adapun analisis kinerja dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Realisasi sebesar 148,81% (125 BKPN) diperoleh dari :

- 1) Pelunasan = 20 BKPN (SPPNL)
- 2) Pengembalian BPJS = 4 BKPN (SKPPN)
- 3) Pengembalian PKNSI = 2 BKPN (SKPPN)
- 4) Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih = 99 PSBDT (PSBDT).

b) Akar Masalah

- 1) Outstanding seluruh BKPN (per 1 jan 2021=338) dengan kondisi 65,38% (221) BKPN tidak didukung dengan barang jaminan dan 34,62% (177) BKPN didukung dengan barang jaminan.
- 2) Sejak diserahkan dokumen barang jaminan sebagian besar tidak diketahui keberadaannya, tidak dikuasai oleh penyerah piutang, tidak dilakukan pengikatan, dan barang jaminan tidak marketable.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- 1) Melakukan konfirmasi keberadaan barang jaminan kepada penyerah piutang.
- 2) *Asset tracing* dengan melakukan pencarian barang jaminan atau harta kekayaan lain ke pihak terkait.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Mengusahakan terlaksananya penyelesaian BKPN dengan melakukan penagihan dan pemeriksaan debitur di lapangan.
- 2) Optimalisasi barang jaminan yang berhasil diidentifikasi.
- 3) Penelitian lapangan untuk mengetahui keberadaan dan atau kemampuan penanggung hutang.

b. Persentase Produktivitas Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Produktifitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	Max/ TLK
Realisasi	58,54%	56,94%	56,94%	48,46%	48,46%	46,48%	46,48%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Telah terlaksana dengan baik (Capaian produktifitas lelang sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 sebesar 46,48%).

b) Akar Masalah

Untuk saat ini belum ada, terlaksana dengan baik.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Mengusahakan agar lelang dalam bentuk virtual/online lebih ramai peserta.

c. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

1) Deskripsi Kinerja

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-19	Pol/ K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	108,7%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Seluruh pelaksanaan lelang telah dilaksanakan dalam bentuk lelang internet (E-Auction).

b) Akar Masalah

Untuk saat sudah terlaksana dengan baik.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Telah melaksanakan lelang dalam bentuk lelang internet (E-Auction).

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Mengusahakan terlaksana seluruh lelang dalam bentuk internet.

d. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN

1) Deskripsi Kinerja

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBFP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBFP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBFP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBFP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBFP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBFP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Target Deviasi PNB dari Biad PPN adalah 15%

Target Deviasi PNB dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Deviasi Data PNB Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Max/ Average
Realisasi	1,5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

- 1) Telah dilaksanakan dengan baik. Penyetoran PNB Lelang telah dilakukan sesuai Rincian Uang Hasil Lelang. **(Seksi Lelang)**.
- 2) Pencatatan pada FocusPN dan pembayaran dilakukan dengan teliti sehingga meminimalisir selisih. **(Seksi HI)**.

b) Akar Masalah

Tidak Ada.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- 1) Penyetoran PNB Lelang sesuai Rincian Uang Hasil Lelang. **(Seksi HI)**.
- 2) Pencatatan pada FocusPN dan pembayaran dilakukan dengan teliti sehingga meminimalisir selisih. **(Seksi HI)**.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Tidak Ada karena sudah tercapai."

6. EDUKASI YANG EFEKTIF

"Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan

2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang.

Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan“.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 1 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

1) Deskripsi Kinerja

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
2. kualitas materi (bobot 15%),
3. kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
4. kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Edukasi yang efektif							
	Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target		91	91			91	91	Max/ Average
Realisasi		92,17	92,17			92,76	92,76	
Capaian		101,28%	101,28%	101,28%	101,28%	102,5%	101,93%	

Adapun analisis kinerja dapat dilihat dari:

- a) Isu Utama dan Implikasi
 - 1) Telah dilaksanakan dengan baik. **(Seksi PN,PKN, dan Lelang)**.
 - 2) Tidak tercapainya Edukom dikarenakan situasi Covid-19 menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya edukasi dan komunikasi **(Seksi Lelang dan Penilaian)**.
- b) Akar Masalah
 - 1) Edukasi kepada debitur belum maksimal **(Seksi PN)**.
 - 2) Edukasi/Sosialisasi secara Virtual dengan memanfaatkan aplikasi Zoom terkendala jaringan internet yang tidak stabil **(Seksi PN)**.
 - 3) Kondisi darurat akibat Covid-19 yang menyebabkan himbauan untuk tidak mengumpulkan massa dalam satu tempat. Sehingga tidak dapat mengundang stakeholder untuk acara edukasi dan komunikasi **(Seksi Lelang dan Penilaian)**.
- c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan
 - 1) Memberikan informasi terupdate kepada tiap pemohon maupun kepada pemenang lelang yang datang serta masyarakat yang datang untuk berkonsultasi. Serta Melakukan penyebaran informasi yang lebih dengan memanfaatkan media sosial **(Seksi Lelang)**.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan satker baik secara langsung atau melalui media yang dianjurkan seperti telepon, aplikasi WhatsApp, Telegram, Zoom dan e-mail. Serta Melaksanakan sosialisasi tatap muka dengan satuan kerja di Aceh Tengah dengan menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. **(Seksi PKN)**.
 - 3) Telah diadakan sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Bulan Desember 2021 melalui media Zoom. **(Seksi PKN)**.
 - 4) Mengadakan acara Edukasi / Bimbingan Teknis / Sosialisasi PMK 15/PMK.06/2021 dan PMK 163/PMK.06/2020 **(Seksi PN)**.
- d) Rekomendasi Rencana Aksi
 - 1) Mengadakan acara Edukasi/Sosialisasi secara Virtual dengan memanfaatkan aplikasi Zoom dan melakukan Penggalan Potensi Lelang **(Seksi Lelang dan Penilaian)**.
 - 2) Koordinasi dengan penyerah piutang untuk penyampaian informasi terkini Pengurusan Piutang Negara kepada debitur, Permintaan bantuan perbaikan jaringan Internet **(Seksi PN)**.

7. PERSENTASE TINDAK LANJUT PERSETUJUAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

“Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti”.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 1 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

1) Deskripsi Kinerja

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:		
Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang. 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	1. Berita acara serah terima

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target		40%	40%			85%	85%	Max/ Avg
Realisasi		73,68%	73,68%			91,23%	91,23%	
Capaian		120%	120%	120%	120%	107,33%	107,33%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Satuan Kerja yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN tidak menindaklanjuti persetujuan dimaksud dikarenakan terdapat beberapa hal teknis lainnya.

b) Akar Masalah

Permasalahan internal satuan kerja.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1) Meningkatkan koordinasi dengan satker, Kanwil DJKN Aceh dan Dit BMN melalui media yang dianjurkan seperti telepon, aplikasi WhatsApp, Telegram, Zoom dan e-mail.

2) Mendorong satuan kerja secara rutin untuk menindaklanjuti Persetujuan yang telah diterbitkan KPKNL Lhokseumawe

3) Memberikan asistensi terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Tidak Ada.

8. SDM YANG KOMPETEN

"SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi".

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 1 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

1) Deskripsi Kinerja

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP).

1 jamlat adalah 45 menit

Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

1. bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
2. bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
3. bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
4. pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya
5. pegawai pada unit non-eselon.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	SDM yang Kompeten							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	57,6%	91,20%	91,20%	95%	95%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

- 1) Enggannya para pegawai dalam mengikuti Diklat dikarenakan sampai dengan Triwulan I masih dilaksanakan Pelatihan Jarak Jauh. Sehingga minat para pegawai menjadi berkurang.
- 2) Pegawai tidak menginput pembelajaranku di Menu Pembelajaran pada Aplikasi *E-Performance*. Baik itu kompetensi klasikal ataupun non klasikal pada kegiatan DKI per Triwulan, atau ketidaksesuaian Kompetensi Klasikal dan Non Klasikal yang dipilih di Menu Pembelajaran saat kegiatan DKI.

b) Akar Masalah

- 1) Pelaksana dan Pejabat tidak mengambil diklat Klasikal atau Non Menu Pembelajaran saat kegiatan DKI.
- 2) Kurangnya minat Pelaksana dan Pejabat mengikuti diklat Klasikal dikarenakan disaat Pandemi COVID-19, diklat dilaksanakan secara *online*.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- 1) Memberikan informasi mengenai Kegiatan *Softcompetency* seperti *E-Learning (Open Access)* kepada seluruh Pegawai KPKNL Lhokseumawe.
- 2) Mengingatkan para pegawai di setiap awal bulannya dalam mengajukan diklat di Aplikasi Diklat.
- 3) Memantau kegiatan DKI untuk mengingatkan pegawai untuk menginput “pembelajaranku” di Menu Pembelajaran.
- 4) Target di Q4 telah tercapai sebesar 120%.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

- 1) Memberikan informasi mengenai Kegiatan *Softcompetency* seperti *E-Learning (Open Access)* kepada seluruh Pegawai agar 24 JP dapat tercapai.
- 2) Menginformasikan pengajuan diklat setiap bulannya pada Aplikasi Diklat.
- 3) Mengingatkan atasan dalam melakukan approval terhadap diklat pegawai pada Aplikasi Diklat DJKN.
- 4) Memantau kegiatan DKI untuk mengingatkan pegawai untuk menginput “pembelajaranku” di Menu Pembelajaran

9. ORGANISASI YANG FIT-FOR-PURPOSE

"Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi".

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 2 IKU. Uraian mengenai kedua IKU adalah sebagaimana berikut:

a. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

1) Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Organisasi yang Fit-For-Purpose							
	Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target							75	Max/ TLK
Realisasi							97,61	
Capaian							120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

- Isu Utama dan Implikasi
Tidak Ada.
- Akar Masalah
Tidak Ada.
- Tindakan yang Telah Dilaksanakan
Membuat dokumentasi yg handal.
- Rekomendasi Rencana Aksi
Tidak ada karena sudah tercapai.

b. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

1) Deskripsi Kinerja

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

2) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Organisasi yang Fit-For-Purpose							
	Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat administrator							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Average/ TLK
Realisasi	94	98,70	96,35	98,8	97,16	99	97,62	
Capaian	117,50%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Terdapat beberapa pegawai yang tidak disiplin mengikuti FGD Kode Etik.

b) Akar Masalah

Tidak Ada.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

- 1) Melaksanakan kegiatan FGD melalui daring/online (zoom meeting) dengan tetap mengikuti protokol COVID-19.
- 2) Menginformasikan pelaksanaan FGD Kode Etik dengan tidak terburu-buru sehingga dapat diikuti oleh seluruh pegawai.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Tidak ada karena sudah tercapai.

10. PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL

“Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja”.

Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Lhokseumawe mengidentifikasi 1 IKU. Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran,

efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

3) Perbandingan dan Analisis Kinerja

KPKNL Lhokseumawe	Pengelolaan keuangan yang optimal							
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/ <u>Avg</u>
Realisasi				98,18%	98,18%	94,65%	94,65%	
Capaian				102,81%	102,81%	99,11%	99,11%	

Adapun analisis kinerjanya dapat dilihat dari:

a) Isu Utama dan Implikasi

Waktu pengesahan Revisi Anggaran yang tidak bisa diprediksikan sehingga tidak memungkinkan untuk merealisasikan RPD pada bulan November dalam waktu yang tepat.

b) Akar Masalah

Revisi Anggaran.

c) Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1) Tetap melaksanakan dan menyampaikan dokumen/laporan yang berkaitan dengan IKPA OM-SPAN dalam rangka menjaga tata kelola keuangan.

2) Melakukan perhitungan IKU PKPA dengan berpedoman pada SE-8/MK.1/2020 sesuai format kertas kerja.

3) Menatausahakan dokumen pendukung perhitungan IKU PKPA.

4) Menyampaikan laporan capaian IKU PKPA.

d) Rekomendasi Rencana Aksi

Melaksanakan kewajiban pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan IKPA OM-SPAN dengan lebih efektif.

Tabel 3.4

Perbandingan % Capaian Capaian Kinerja 2020 dan 2021

1 Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	
1a-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
120%	94,14%
1b-CP Tingkat Penurunan outstanding piutang negara(Saldo PND S s.d 2016)	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
120%	120,00%
1c-N Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
100,00%	116,49%
2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	
2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
104,00%	104,44%
3 Pengelolaan lelang yang optimal	
3a-CP Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
33,30%	120,00%

4 Manajemen Pelayanan yang berkualitas	
4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
109,58%	108,89%
5 Tata Kelola kekayaan negara yang efektif	
5a-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
100%	101,20%
5b-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
120%	120,00%
5c-CP Persentase Nilai Kekayaan Negara yang Diutilisasi	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
110,82%	110,82%
5d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
120,00%	121,54%

6 Penilaian yang Berkualitas	
6a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
120,00%	120,00%
7 Tata Kelola Lelang yang Efektif	
7a-CP Persentase Produktivitas Lelang	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
115,74%	120,00%
7b-CP Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
111,11%	108,70%
8 Edukasi yang Efektif	
8a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
107,82%	101,93%
9 Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	
9a-N Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
112,90%	107,33%
9b-CP Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian/Perbaikan atas Sisa Aset Objek Penilaian Kembali BMN	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
100,08%	100,08%

10 SDM Yang Kompeten	
10a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
105,56%	120%
11 Organisasi Yang Fit For Purpose	
11a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
120,00%	-
11b-N Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja Berbasis BSC	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
120,00%	99,40%
11c-N Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
120,00%	96,17%
12 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	
12a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
% Capaian 2020	% Capaian 2021
102,52%	97,39%

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2021, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021.

Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

Realisasi Anggaran KPKNL Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	1.780.768.000,00	1.763.972.399,00	99.07%
Belanja Modal	29.550.000,00	29.550.000,00	100%
Belanja Pegawai	0	0	0%
Total	1.810.318.000,00	1.793.552.399,00	99,07

Persentase penyerapan anggaran di KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2021 adalah sebesar 99,07. sebesar Rp 1.793.552.399,00. Pada halaman selanjutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Lhokseumawe dari Tahun 2019 s.d. 2020. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 s.d. 2020 persentase realisasi penyerapan anggaran mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan jumlah pegawai, penyerapan perjalanan dinas, penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal secara maksimal.

Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Lhokseumawe dari Tahun 2020 s.d. 2021

	2020			2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	1.692.086.000,00	1.618.618.570,00	95.66	1.780.768.000,00	1.763.972.399,00	99.07
Belanja Modal	388.479.000,00	388.350.000,00	99.97	29.550.000,00	29.550.000,00	100
Belanja Pegawai	939.388.000,00	863.834.475,00	91,96	0	0	0
Total	3.019.953.000,00	2.870.803.045,00	95,06	1.810.318.000,00	1.793.552.399,00	99,07

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Lhokseumawe tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Lhokseumawe dalam tahun anggaran 2021 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Lhokseumawe merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Lhokseumawe mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Akhir kata, dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi sehingga tercipta akuntabilitas yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan khususnya oleh Pimpinan Kantor Wilayah DJKN Aceh dan Kantor Pusat DJKN. Diharapkan dapat diterima umpan balik yang baik guna peningkatan kinerja sebagai bahan pengambilan kebijakan di masa mendatang.

LAMPIRAN

Kaleidoskop Tahun 2021



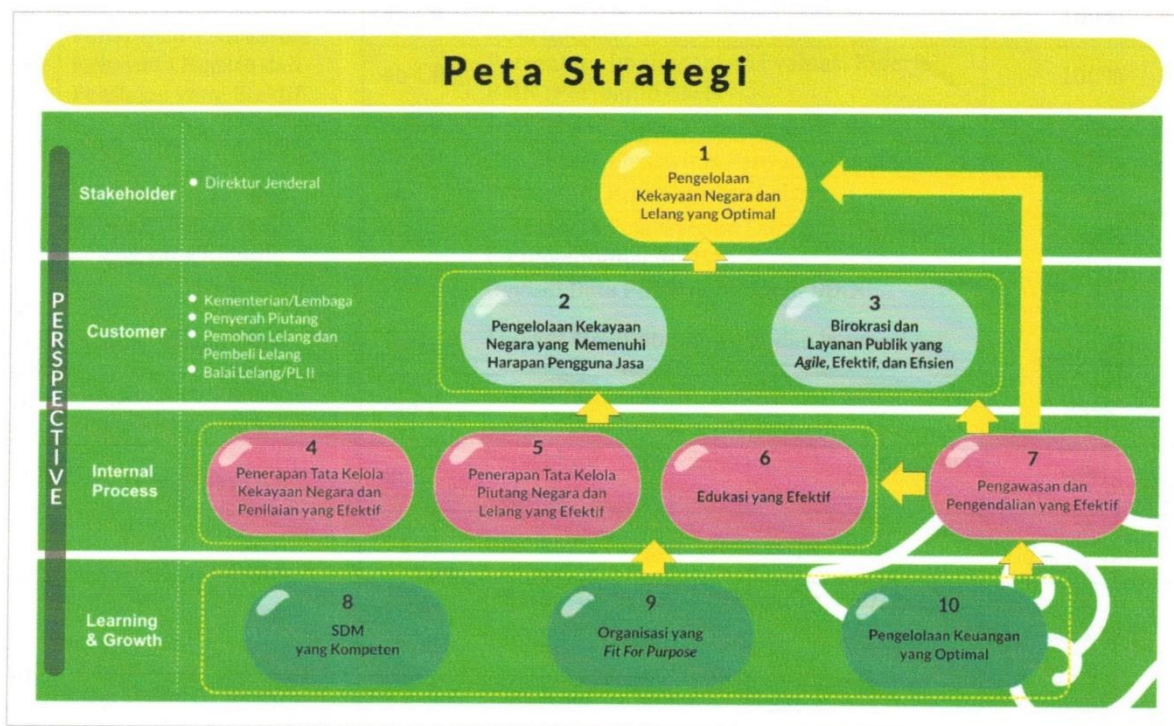
**KONTRAK KINERJA
NOMOR 8/KN.13/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88 (skala 100)
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,5 (skala 5)
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	91 (skala 100)
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75 (skala 100)
		9b-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80 (skala 100)
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp231.201.000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp25.554.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp39.436.000
3. Pengelolaan Aset	Rp69.242.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
Dukungan Manajemen	Rp1.792.755.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp33.518.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.660.276.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp72.049.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp26.912.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

Banda Aceh, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh,

Syukriah HG

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Lhokseumawe

Bono Yudianto

RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88	88	88	88	88	88	88 (skala 100)
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien							
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,5	4,5 (skala 5)
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
	4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
6	Edukasi yang Efektif							
	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91	91	-	91	91	91 (skala 100)
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
8	SDM yang Kompeten							
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
9	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
	9a-N Nilai reuiu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75 (skala 100)

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	9b-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80 (skala 100)
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Banda Aceh, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Lhokseumawe,


Bono Yudianto

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Syukriah HG	1	Nama	Bono Yudianto
2	NIP	197004191996032001	2	NIP	197405291994031004
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk.I / IV.b	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tk.I / IV.b
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudkan ketepatan waktu layanan Kekayaan Negara dan Lelang	-	88 (skala 100)	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan realisasi pokok lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,5 (skala 5)	100	12 bulan	-
7	Menyertipikasi Bidang Tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan ketergunaan hasil penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan efektivitas penyelesaian BKNP	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan produktivitas lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan akurasi data PNBP fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	91 (skala 100)	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
17	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
19	Mewujudkan nilai revaluasi Pengelolaan Kinerja	-	75 (skala 100)	100	12 bulan	-
20	Melaksanakan FGD Pejabat Administrator	-	80 (skala 100)	100	12 bulan	-
21	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	Rp2.023. 956.000

Banda Aceh, 29 Januari 2021

Pejabat Penilai,



Syukriah HG
NIP 197004191996032001

PNS yang Dinilai,



Bono Yudianto
NIP 197405291994031004

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KOIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat 2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi underutilized/ idle yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Seksi PKN	-

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe,


Bono Yudianto

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
KANTOR WILAYAH DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021
Nomor 8/KN.13/2021

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe, saya menyatakan:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Kepala KPKNL Lhokseumawe



Bono Yudianto

DAFTAR RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG LHOKSEUMAWE
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2021

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Tahun	Proyeksi Akhir Tahun
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	RE#1 Penggunaan BMN yang belum sesuai SBSK	9	8
		RE#2 Terdapat BMN yang telah dilakukan pemanfaatan BMN tetapi belum mendapat persetujuan Pengelola Barang	11	10
		RE#3 Tahapan pengurusan piutang negara tidak dapat terlaksana secara optimal	19	11
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	RE#4 Pelayanan melewati SOP	2	1
		RE#5 Objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang	1	1
		RE#6 adanya pembatalan lelang	24	22
		RE#7 Kesalahan penelitian berkas permohonan lelang	10	8
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	RE#8 Adanya pengenaan biaya diluar ketentuan oleh oknum pegawai	1	1
		RE#9 Target IKPL tidak tercapai	1	1
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	RE#10 Bidang tanah yang menjadi target sertifikasi tidak dapat disertipikatkan	6	5
		RE#11 Adanya aset yang berpotensi idle pada satker K/L	1	1
		RE#12 nilai wajar hasil penilaian BMN tidak akurat	1	1
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	RE#13 Banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih	19	11
		RE#14 Banyaknya lelang TAP	25	23
		RE#15 Pelaksanaan lelang e-auction batal	11	9
6.	Edukasi yang Efektif	RE#16 Kesalahan berulang terhadap prosedur ataupun dokumen yang dilakukan oleh KPKNL	1	1
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	RE#17 Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN	1	1
		RE#18 Satuan kerja terlambat menyampaikan laporan wasdal	1	1
8.	SDM yang kompeten	RE#19 tidak sesuainya <i>hard competency</i> pegawai dengan bidang tugas	2	1

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Tahun	Proyeksi Akhir Tahun
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	RE#20 adanya pelanggaran kode etik dan disiplin oleh pegawai	1	1
		RE#21 kinerja individu pegawai tidak mendukung tercapainya kinerja unit/organisasi	1	1
		RE#22 Penarikan dana tidak sesuai dengan rencana	14	11
		RE#23 Adanya perubahan kebijakan dan struktur anggaran (penambahan/pengurangan)	13	10

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Kepala KPKNL Lhokseumawe



Bono Yudianto

**LEMBAR PENETAPAN
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Bersama ini ditetapkan manual IKU Kepala Kantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe untuk periode Kontrak Kinerja tahun 2021 yang meliputi:

- a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK;
- b. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP);
- c. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara;
- d. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang;
- e. Persentase Realisasi Pokok Lelang;
- f. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL;
- g. Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi;
- h. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset);
- i. Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian;
- j. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP;
- k. Persentase Produktivitas Lelang;
- l. Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*;
- m. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN;
- n. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi;
- o. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara;
- p. Persentase pengembangan kompetensi pegawai;
- q. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja;
- r. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator;
- s. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran;

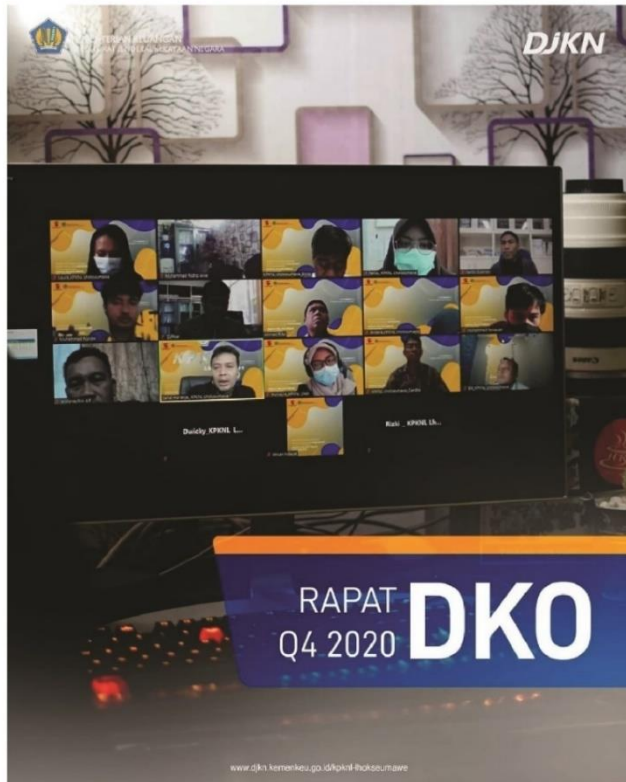
Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 29 Januari 2021

Kepala Seksi Kepatuhan Internal,
Selaku Mitra Manajer Kinerja Organisasi


Ahmad Rifai

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Lhokseumawe,


Bono Yudianto



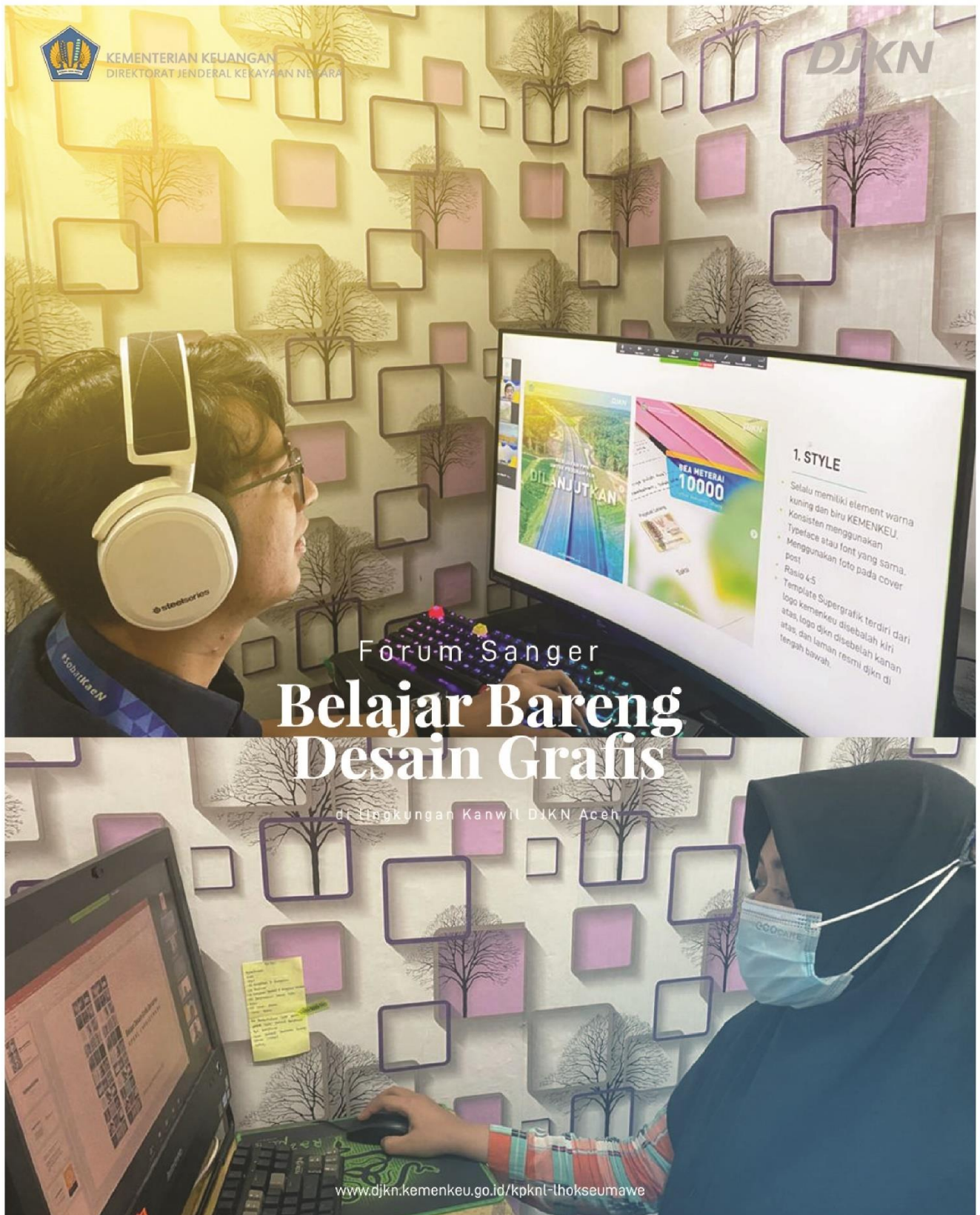
Catatan Kaki:

Raw Data	Pengelolaan Lelang yang Optimal Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang)
	Target
Pokok Lelang Kelas I	Rp69.586.0
Pokok Lelang Pegadaian	Rp13.050.0
Target Pokok Lelang Total	Rp82.636.0



Memulai tahun dengan Dialog Kinerja Organisasi Triwulan IV 2020

Januari, KPKNL Lhokseumawe memulai tahun 2021 dengan mengadakan rapat kerja untuk menyusun strategi dan rencana kerja satu tahun berjalan. Rapat yang dilaksanakan pada 4 Januari 2021 tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Lhokseumawe, Bono Yudianto serta dihadiri oleh seluruh jajaran pada KPKNL Lhokseumawe.



Belajar Bareng Desain Grafis di Forum Sanger

Februari, KPKNL Lhokseumawe mendapat kesempatan mengadakan knowledge sharing tentang Belajar Desain Grafis di Forum Sanger. Forum Sanger, akronim dari Sama-sama Ngerti merupakan forum belajar dan silaturahmi di wilayah Kanwil DJKN Aceh. Forum Sanger digelar secara daring dan diikuti oleh seluruh jajaran di Kanwil DJKN Aceh



Februari, KPKNL Lhokseumawe juga melaksanakan Serah Terima Berkas Sertifikasi dari satuan kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera dan Pelaksana jaringan Pemanfaatan Air di wilayah KPKNL Lhokseumawe, untuk selanjutnya diserahkan dan ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanah-



Serah Terima Berkas Sertifikasi

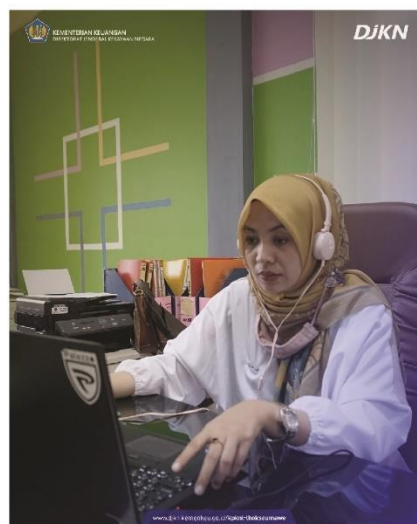
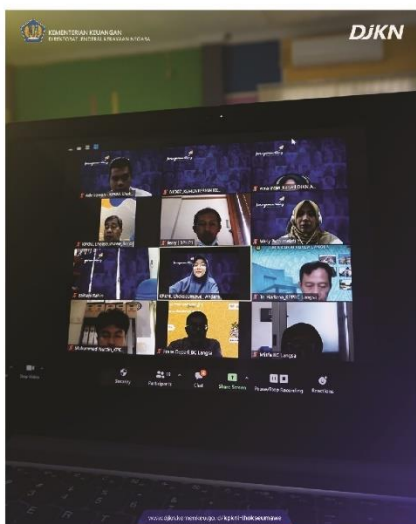


Serah Terima BMN Idle

Di bulan Maret, KPKNL Lhokseumawe melaksanakan serah terima Barang Milik Negara idle atas tanah dan bangunan dalam kuasa penggunaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lhokseumawe kepada Pengelola Barang yaitu KPKNL Lhokseumawe.



KPKNL Lhokseumawe juga menggelar Sosialisasi Program Keringanan Utang secara daring pada 29 Maret 2021. Program Keringanan Utang merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat pada saat pandemi Covid-19. Program Keringanan Utang merupakan program percepatan penyelesaian Piutang Negara dan/atau pemberian insentif yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum. Keringanan utang yang dimaksud adalah pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya atau beban lainnya.



Sosialisasi Program Keringanan Utang Secara Daring



Sosialisasi Pengelolaan BMN

April, KPKNL Lhokseumawe bersama Kantor Wilayah DJKN Aceh melaksanakan fungsi edukasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dengan mengadakan Sosialisasi Pengelolaan BMN kepada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DJKN



Penagihan Langsung dan Penyampaian
Informasi Crash Program Keringanan
Hutang, Kreditur KOMINFO



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknL-lhokseumawe

Sosialisasi Pengelolaan BMN

Di bulan yang sama, KPKNL Lhokseumawe melalui Tim Seksi Piutang Negara juga melakukan penagihan langsung sekaligus melakukan sosialisasi Program Keringanan Utang kepada para debitur dari kreditur Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

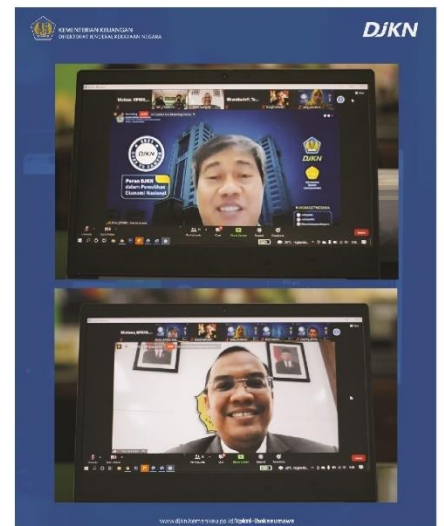
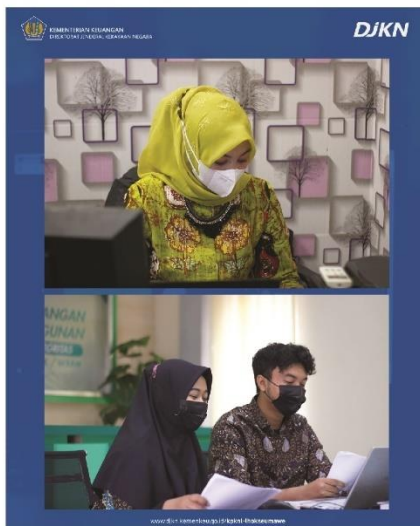
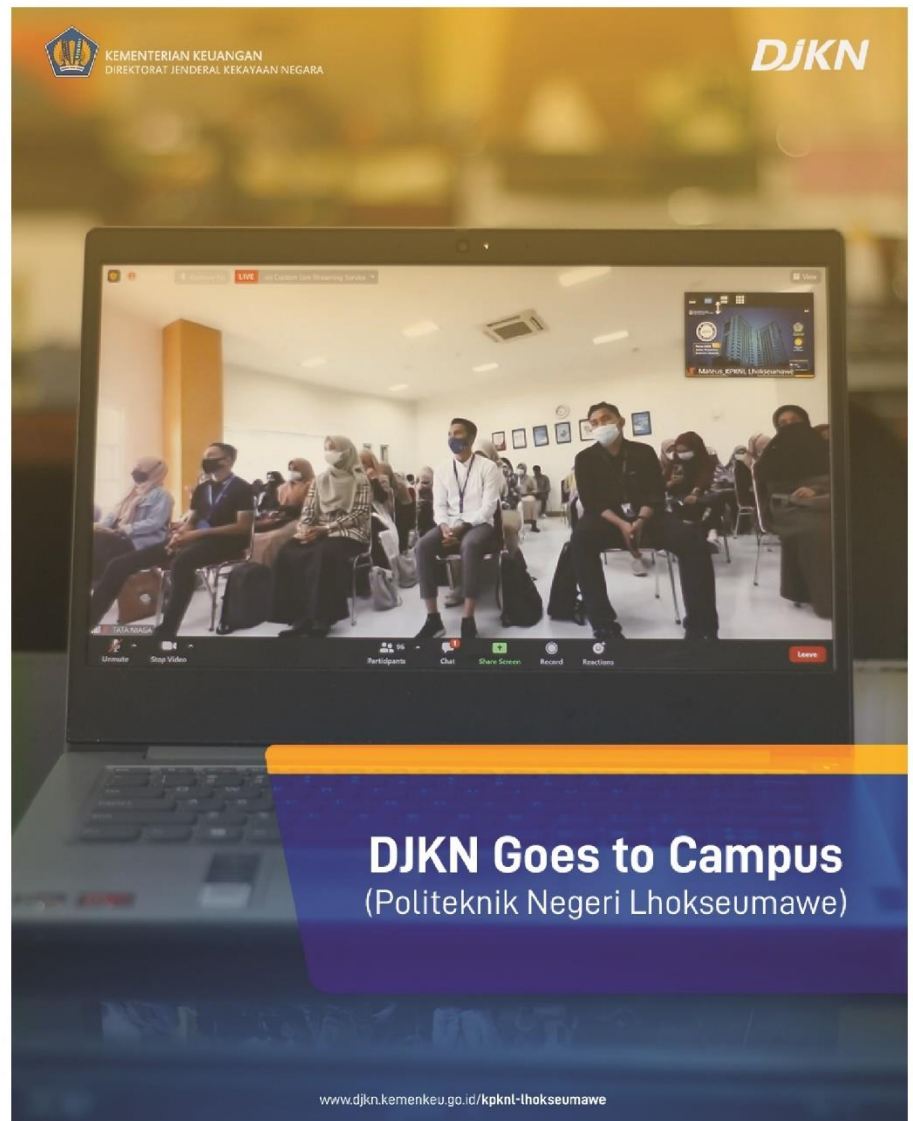


KPKNL Lhokseumawe melakukan Penilaian BMN

Mei, KPKNL Lhokseumawe melalui Tim Penilai melakukan Penilaian Barang Milik Negara pada satuan kerja Komando Resor Militer 011/Lilawangsa.

Juni, KPKNL Lhokseumawe berkesempatan menyelenggarakan kegiatan DJKN Goes to Campus bersama Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan tersebut mengambil tema Peran DJKN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan diikuti oleh mahasiswa hingga rektor Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Kegiatan DJKN Goes to Campus merupakan kegiatan untuk meningkatkan sinergi antar instansi, khususnya kepada instansi pendidikan tinggi. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa APBN yang difokuskan untuk penanganan pandemi dan penguatan pemulihan ekonomi melalui realokasi belanja produktif dan penguatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

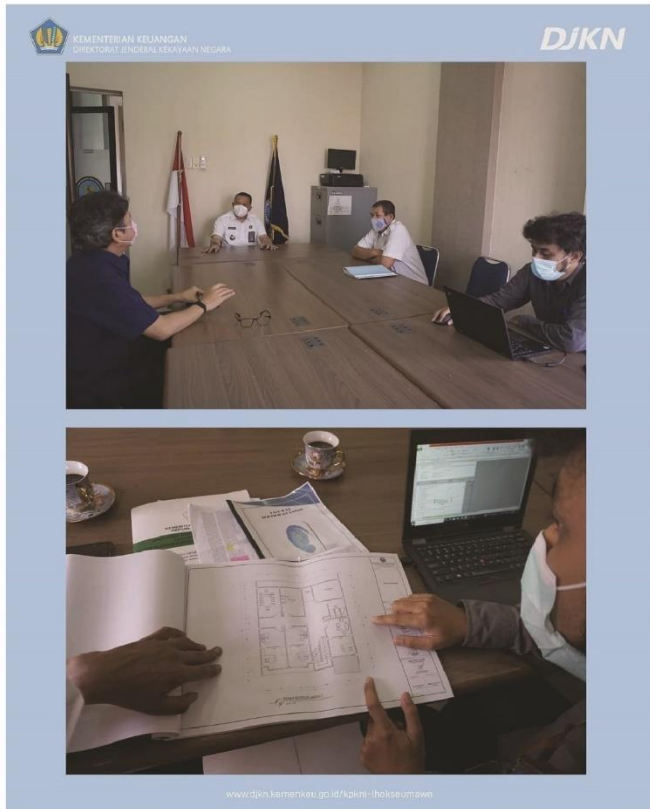


**Mengadakan DJKN Goes to Campus bersama
Politeknik Negeri Lhokseumawe**



Pembinaan Kepala Kanwil DJKN Aceh Kepada Seluruh Jajaran KPKNL Lhokseumawe

Juni, Kantor Wilayah DJKN Aceh mengadakan Pembinaan kepada seluruh pegawai KPKNL Lhokseumawe. Kepala Kanwil DJKN Aceh, Syukriah HG mengapresiasi atas capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) yang diraih oleh KPKNL Lhokseumawe. Menurut Syukriah, pencapaian IKU tersebut adalah kerja keras dan sinergi seluruh pegawai. Seluruh pegawai harus mampu melakukan perbaikan terus-menerus dan peka terhadap semua perubahan. Dalam kesempatan tersebut, KPKNL Lhokseumawe juga mendapat apresiasi atas keikutsertaannya dalam pemilihan Kantor Pelayanan Terbaik, dan telah bersungguh-sungguh dalam proses meraih predikat tersebut.



Juli, KPKNL Lhokseumawe juga melakukan pengukuran Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN pada Satuan kerja Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemilihan Umum Bireuen. SBSK BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menyusun Perencanaan Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.



Pengukuran Standar Barang Standar Kebutuhan BMN



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe

Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia

Agustus menjadi bulan yang sakral bagi seluruh masyarakat, khususnya tanggal 17 yang diperingati sebagai hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus selalu mengingatkan kita tentang perjuangan para pahlawan dan segenap bangsa untuk merebut kemerdekaan Indonesia.

Pada bulan Agustus tahun ini, Indonesia masih dilanda Pandemi Covid-19, sehingga untuk melaksanakan upacara Kemerdekaan Republik Indonesia, KPKNL Lhokseumawe dan seluruh jajaran mengikuti upacara secara daring. Namun, walaupun diikuti secara daring, segenap pegawai KPKNL Lhokseumawe tetap hikmat mengikuti upacara tersebut.

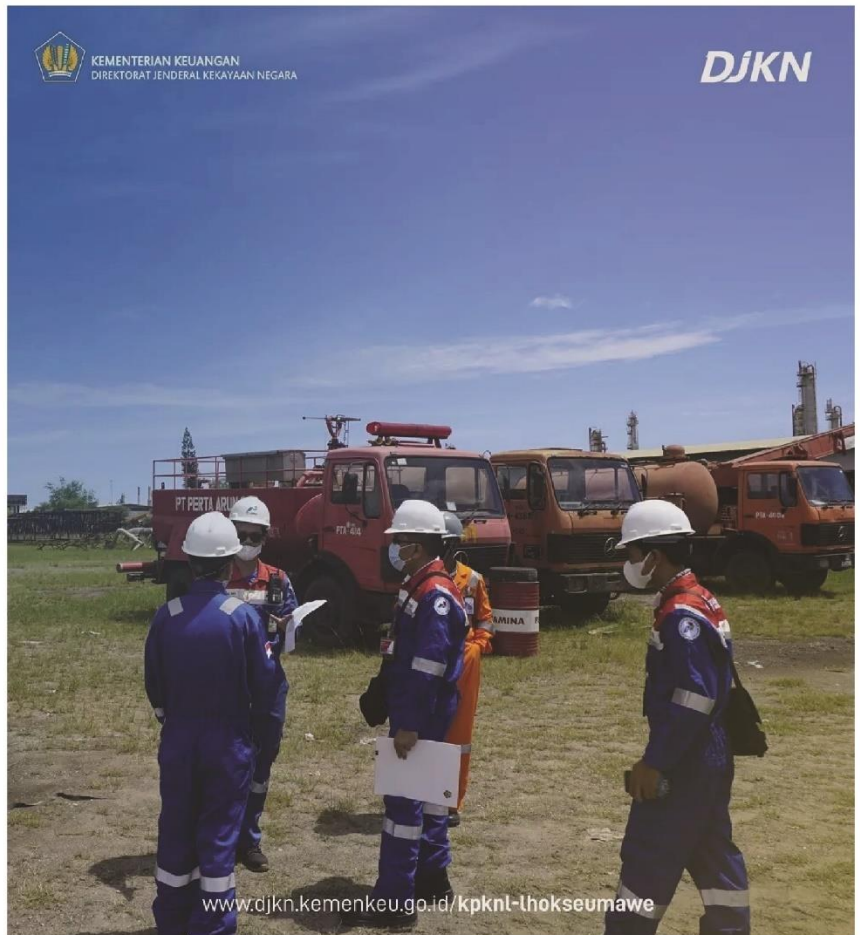


www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe

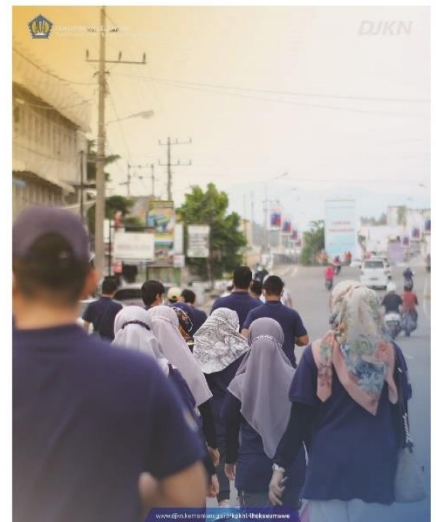
Penilaian pada LMAN

September, KPKNL Lhokseumawe melalui Tim Penilai KPKNL Lhokseumawe melakukan penilaian Objek Penilaian berupa BMN pada Lembaga Manajemen Aset Negara yang disewa oleh PT Arus Gas dengan jangka waktu 15 tahun.

Tim penilai melakukan penilaian ke tiga titik lokasi, yaitu tanah seluas 484.124,45 meter persegi, 26 bangunan pada area plantsite, 160 unit peralatan mesin pengolahan gas, 182 unit rumah, dan 69 unit kendaraan.

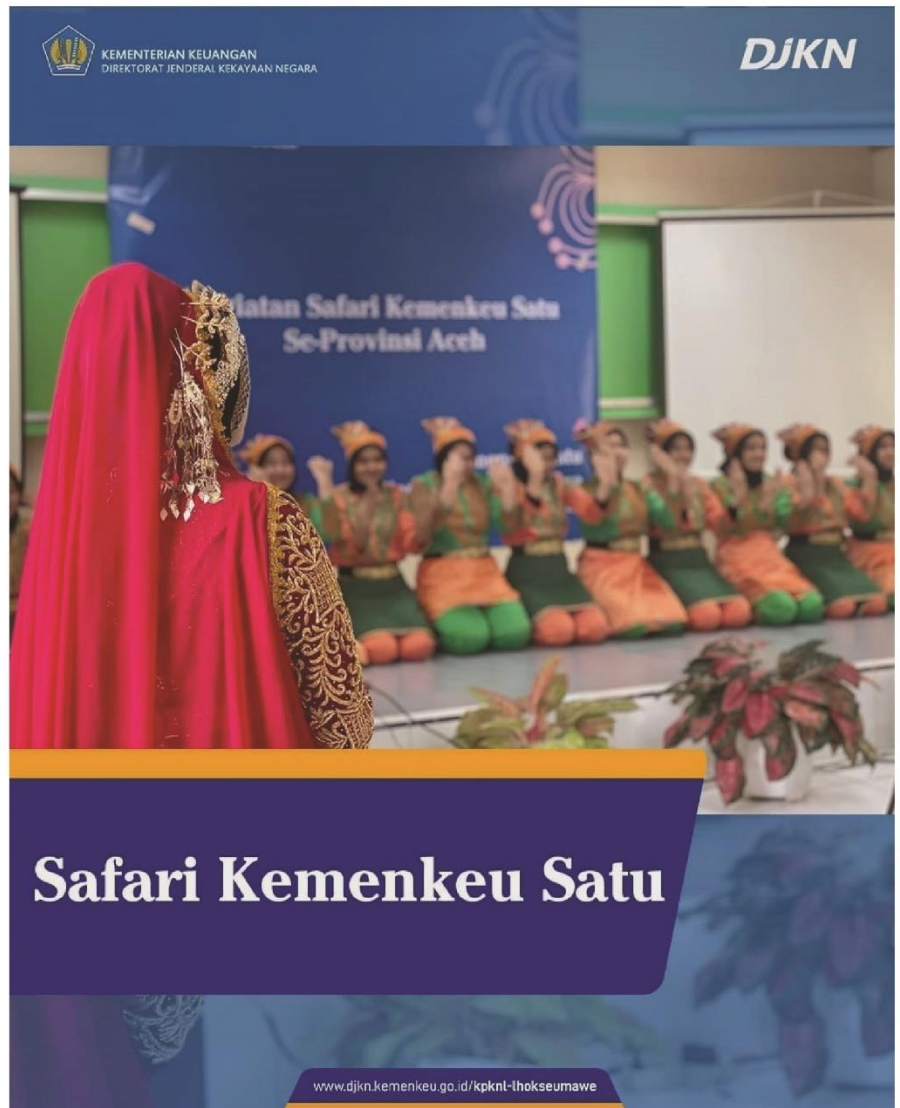


Oktober, KPKNL Lhokseumawe turut memeriahkan Hari Oeang Republik Indonesia ke-75. KPKNL Lhokseumawe bersama Kemenkeu Satu mengadakan acara Jalan Santai Hari Oeang yang mengambil tema Pulihkan Ekonomi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya, Menuju Indonesia yang Unggul dan Tangguh.



Merayakan Hari Oeang Republik Indonesia

November, KPKNL Lhokseumawe mendapat kesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Kegiatan Safari Kemenkeu Satu. Bertempat di Aula KPKNL Lhokseumawe, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh atau yang disebut juga Kemenkeu Satu menggelar kegiatan Safari Kemenkeu Satu dengan turut mengundang pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya.

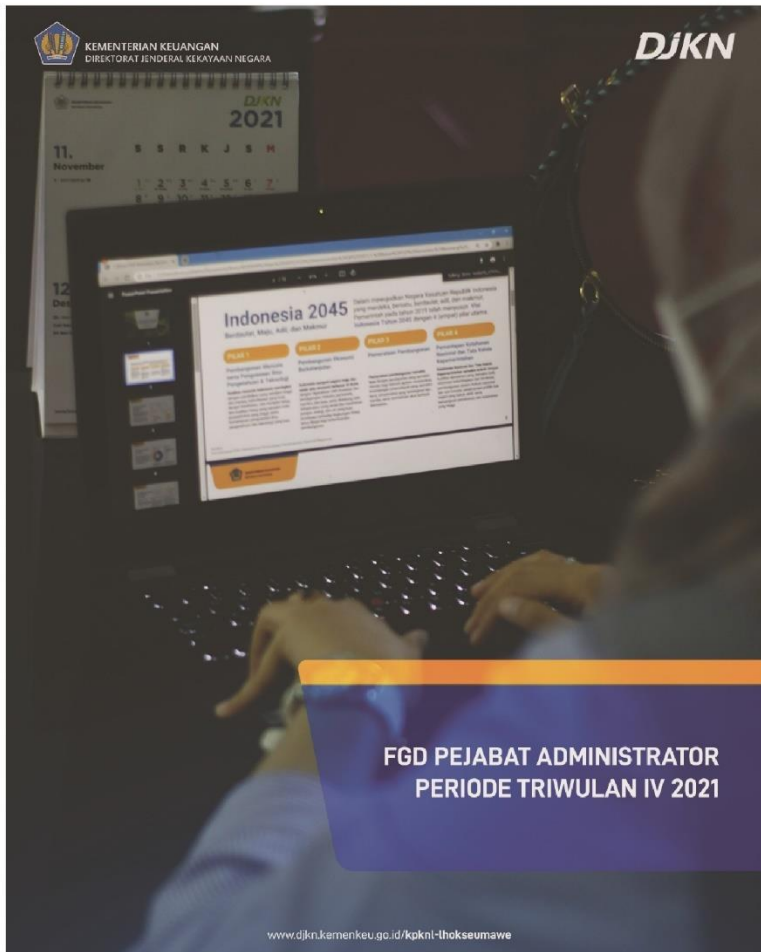


Safari Kemenkeu Satu



Optimalisasi Penggalian Potensi PNBP

November, KPKNL Lhokseumawe melalui Kepala KPKNL Lhokseumawe, Bono Yudianto mengadakan kunjungan kerja dalam rangka Optimalisasi Penggalian Potensi PNBP ke Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah di Takengon. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan upaya optimalisasi pencapaian IKU PNBP Pengelolaan Aset Tahun 2021, salah satunya melalui pelaksanaan lelang.



Mengadakan Focus Group Discussion

Desember, KPKNL Lhokseumawe juga melaksanakan Focus Group Discussion yang dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Lhokseumawe, Bono Yudianto. FGD tersebut membahas tema Kemenkeu Bersinergi Membangun Negeri dan Presidensi G20 Indonesia 2022. Untuk menyambut Presidensi G20 tersebut, diperlukan kolaborasi dan sinergi untuk mewujudkan keselarasan dan akselerasi yang nyata untuk negeri.

